

Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019

¹Kadek Peni Suandani, ²I Gede Putu Banu Astawa,

Program Studi S1 Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: venisuandani88@gmail.com,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit, belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan instrumen dalam pengukurannya dan pengolahan secara statistik. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali dengan 8 kabupaten dan 1 kotamadya. Laporan Realisasi Anggaran yang akan diteliti yakni pada tahun 2015-2019 atau selama lima tahun, sehingga jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 45 laporan. Pengambilan sampel menggunakan metode *total sampling*, sehingga diperoleh sampel sejumlah 45. Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi yang kemudian diolah dengan uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS.

Hasil penelitian menyatakan bahwa opini audit, belanja modal, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Kata kunci: kinerja keuangan, opini audit, belanja modal, PAD, dana perimbangan

Abstract

This study aims to determine the effect of audit opinion, capital expenditure, local revenue and balance funds on financial performance. This study uses a quantitative approach using instruments in its measurement and statistical processing. This research was conducted in regencies / cities in Bali Province. The population in this study were all districts / cities in Bali Province with 8 districts and 1 municipality. The Budget Realization Report that will be studied is in 2015-2019 or for five years, so that the total population in this study is 45 reports. The sample was taken using the total sampling method, in order to obtain a sample of 45. The data of this study were collected using the documentation method which was then processed by multiple linear regression analysis with the help of SPSS.

The results of the study state that audit opinion, capital expenditures, local revenue, general allocation funds, and special allocation funds have a positive effect on government financial performance.

Keywords: *financial performance, audit opinion, capital expenditure, PAD, balance funds*

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan tidak terlepas dari pengelolaan anggaran pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik. Pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah serta para pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sesuai data potensi suatu wilayah dari sisi pendapatan dan pengeluarannya. Salah satu provinsi di Indonesia yang terus berupaya dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk dapat menciptakan kinerja keuangan yang memadai adalah Provinsi Bali. Rencana pembangunan di Bali tidak hanya dilakukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga harus mampu menciptakan pemerataan pendapatan masyarakatnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi tolak ukur kinerja keuangan daerah. Otonomi daerah dapat memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya serta menggali potensi yang dimiliki daerah demi tercapainya pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kinerja keuangan daerah dan pelayanan publik. Tercapainya pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat juga berasal dari tata cara

pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien tentunya akan berdampak pada kinerja daerah yang diukur melalui pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Jayanti dan Priyo, 2018).

Indikator yang sering digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang baik menjadi indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Horota, 2017). Pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat tentunya dengan adanya pengelolaan keuangan yang memadai sehingga menciptakan kinerja yang efektif. Melalui pengelolaan keuangan yang baik tentunya aspek pendapatan daerah akan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan perekonomian masyarakat, sehingga ekonomi akan terus berkembang tentunya ke arah yang lebih baik. Data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Prov. Bali Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/ Kota (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Jembrana	6,19	5,96	5,28	5,59	5,56
Kab. Tabanan	6,19	6,14	5,37	5,73	5,60
Kab. Badung	6,24	6,81	6,08	6,74	5,83
Kab. Gianyar	6,30	6,31	5,46	6,03	5,64
Kab. Klungkung	6,11	6,28	5,32	5,50	5,44
Kab. Bangli	6,16	6,24	5,31	5,50	5,47
Kab. Karangasem	6,00	5,92	5,06	5,48	5,50
Kab. Buleleng	6,07	6,02	5,38	5,62	5,55
Kota Denpasar	6,14	6,51	6,05	6,43	5,84
Provinsi Bali	6,03	6,33	5,56	6,33	5,63

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2020

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2015 sebesar 6,03%, meningkat di tahun 2016 menjadi 6,33%. Di tahun 2017 kembali menurun cukup signifikan menjadi sebesar 5,56%. Tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi

menjadi sebesar 6,33% atau setara dengan tahun 2016. Menurun drastis kembali di tahun 2019 yang hanya sebesar 5,63%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali masih perlu banyak dievaluasi karena

sejauh ini sesuai data yang ada, pertumbuhan ekonomi masih berfluktuasi yang terkadang mengalami penurunan yang dimana hal ini dapat menjadi salah satu tolak ukur kurang optimalnya pengelolaan keuangan yang menciptakan kinerja keuangan yang kurang memuaskan.

Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, diantaranya: opini audit, belanja modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana perimbangan. Kusuma (2017) menyatakan bahwa opini audit BPK merupakan wujud akuntabilitas pemerintah daerah yang dapat dinilai oleh publik yang dimana semakin baik opini audit maka dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja suatu pemerintah daerah. Semakin baik opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tentunya akan dapat meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap Pemerintah Daerah, karena masyarakat akan lebih percaya atas kredibilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang mana atas kepercayaan yang semakin meningkat tersebut maka mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah.

Penelitian mengenai opini audit pernah dilakukan oleh Masdiantini (2016) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil yang sama juga diperoleh Budianto (2015) yang menemukan bahwa opini audit berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁: Opini audit (X₁) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengeluaran atau pembayaran

aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk kegiatan pemerintahan dan memberikan manfaat untuk masyarakat, dimana dengan alokasi belanja modal dalam penelitian ini memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah.

Penelitian mengenai belanja modal pernah dilakukan oleh Pratiwi (2018) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara belanja modal dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂: Belanja modal (X₂) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

PAD yang semakin meningkat diharapkan dapat memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang memadai kepada masyarakat. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat atau baik dalam membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Tahir, 2018).

Penelitian mengenai PAD pernah dilakukan oleh Anggreni dan Artini (2019) yang menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil sejalan juga diperoleh Pratiwi (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara PAD dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: Pendapatan asli daerah (X₃) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Prinsip dana alokasi umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh dana alokasi umum yang relatif kecil. Penelitian mengenai DAU pernah dilakukan oleh

Azizah (2019) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian oleh Gracenov (2016) juga menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keempat yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₄: Dana alokasi umum (X₄) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat berpengaruh terhadap tercapainya kinerja keuangan pemerintah daerah yang memadai untuk kepentingan publik. Dana Alokasi Khusus (DAK) dikatakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan. Semakin besar DAK yang diberikan kepada pemerintah daerah tentunya akan membantu pemerintah daerah dalam membiayai urusan daerah, sehingga kinerja keuangan akan semakin baik pula karena dana yang dikelola oleh pemerintah daerah semakin banyak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kelima yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₅: Dana alokasi khusus (X₅) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

Berdasarkan pemaparan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris (1) pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah, (2) pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan kinerja keuangan pemerintah, (3) pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja

keuangan pemerintah, (4) pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah, dan (5) pengaruh dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan instrumen dalam pengukurannya dan mengolahnya secara statistik dan berbentuk angka-angka. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali dengan 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kotamadya. Laporan Realisasi Anggaran yang akan diteliti yakni pada tahun 2015-2019 atau selama lima tahun, sehingga jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 45 laporan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengambilan sampel menggunakan metode *total sampling*. Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi yang kemudian diolah dengan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 22.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil pada penelitian ini meliputi hasil uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Opini Audit (X ₁)	45	4,00	5,00	4,98	0,15
Belanja Modal (X ₂)	45	0,93	9,72	2,75	2,47
Pendapatan Asli Daerah (X ₃)	45	0,46	48,35	7,63	12,19
Dana Alokasi Umum (X ₄)	45	2,87	10,28	6,65	1,70
Dana Alokasi Khusus (X ₅)	45	0,13	5,23	1,97	1,37
Kinerja Keuangan (Y)	45	2,10	21,79	7,91	5,62
<i>Valid N (listwise)</i>	45				

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat dilihat bahwa variabel opini audit (X₁)

mempunyai skor minimum 4, skor maksimum 5, skor rata-rata 4,98 dengan

standar deviasi 0,15. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai opini audit terhadap nilai rata-rata sebesar 0,15. Variabel belanja modal (X_2) mempunyai skor minimum 0,93, skor maksimum 9,72, skor rata-rata 2,75 dengan standar deviasi 2,47. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai belanja modal terhadap nilai rata-rata sebesar 2,47.

Variabel pendapatan asli daerah (X_3) mempunyai skor minimum 0,46, skor maksimum 48,35, skor rata-rata 7,63 dengan standar deviasi 12,19. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai pendapatan asli daerah terhadap nilai rata-rata sebesar 12,19. Variabel dana alokasi umum (X_4) mempunyai skor minimum 2,87, skor maksimum 10,28, skor rata-rata 6,65 dengan standar deviasi 1,70. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai dana alokasi umum terhadap nilai rata-rata sebesar 1,70.

Variabel dana alokasi khusus (X_5) mempunyai skor minimum 0,13, skor maksimum 5,23, skor rata-rata 1,97 dengan standar deviasi 1,37. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai dana alokasi khusus terhadap nilai rata-rata sebesar 1,37. Variabel kinerja keuangan (Y) mempunyai skor minimum 2,10, skor maksimum 21,79, skor rata-rata 7,91 dengan standar deviasi 5,62. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kinerja keuangan terhadap nilai rata-rata sebesar 5,62.

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas digunakan untuk menguji *goodness of fit* antar distribusi sampel dan distribusi lainnya. Uji normalitas dilakukan dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan bantuan program statistik komputer SPSS versi 22.0 *for windows*. Peneliti menggunakan taraf signifikansi 5%, maka variabel penelitian dikatakan berdistribusi normal jika nilai analisis *Kolmogorov-Smirnov* memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,107 dengan nilai signifikansi sebesar 0,200 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual

berdistribusi secara normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawanya (2) *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 10% atau VIF lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan model telah bebas dari masalah multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai VIF lebih kecil daripada 10 dan nilai *tolerance* lebih besar 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model bebas dari multikolinearitas.

Uji asumsi klasik yang selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain Heteroskedastisitas dapat diketahui melalui uji *Glejser*. Jika probabilitas signifikan masing-masing variabel independen > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai *Absolut Residual* (AbsRes). Variabel opini audit mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,126, variabel belanja modal mempunyai nilai signifikansi 0,873, variabel pendapatan asli daerah mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,853, variabel dana alokasi umum mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,470, dan variabel dana alokasi khusus mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,177. Semua variabel mempunyai probabilitas signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Uji asumsi klasik yang selanjutnya adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang dengan kesalahan pengganggu

pada periode sebelumnya. Hasil pengujian memperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 0,896. Nilai *Durbin-Watson* pada penelitian ini lebih besar daripada -2 dan lebih kecil daripada 2. Hal ini berarti bahwa model regresi tidak terjadi adanya autokorelasi.

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda.

Model regresi berganda digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada, yaitu untuk melihat pengaruh diantara dua variabel atau lebih. Uji hipotesis yang pertama dilakukan adalah uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,920	0,847	0,827	2,671

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan data pada tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,827 yang menunjukkan bahwa variasi variabel opini audit, belanja modal, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus hanya mampu menjelaskan 82,7% variasi variabel kinerja keuangan. Sisanya sebesar 17,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan.

Selanjutnya dilakukan uji statistik t yang menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara

individu dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dengan kriteria sebagai berikut:

- Apabila nilai signifikansi > 0,05, maka Hipotesis ditolak yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka Hipotesis diterima yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil uji statistik t pada penelitian ini disajikan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Statistik t

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (<i>Constant</i>)	16,154	1,272		7,828	0,038
Opini Audit (X_1)	0,747	0,638	0,037	2,557	0,046
Belanja Modal (X_2)	0,888	1,989	0,259	2,961	0,034
Pendapatan Asli Daerah (X_3)	0,979	1,285	0,646	2,319	0,026
Dana Alokasi Umum (X_4)	0,954	0,766	0,059	2,552	0,036
Dana Alokasi Khusus (X_5)	0,267	0,914	0,202	2,480	0,018

a. *Dependent Variable*: Kinerja keuangan

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan data pada tabel 4 dapat dilihat bahwa variabel opini audit memiliki nilai signifikansi sebesar $0,046 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_1 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa

variabel X_1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H₁ diterima** yaitu opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Variabel belanja modal memiliki nilai signifikansi sebesar $0,034 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_2 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_2 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H₂ diterima** yaitu belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,026 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_3 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_3 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H₃ diterima** yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Variabel dana alokasi umum memiliki nilai signifikansi sebesar $0,036 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_4 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_4 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H₄ diterima** yaitu dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Variabel dana alokasi khusus memiliki nilai signifikansi sebesar $0,018 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_5 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_5 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H₅ diterima** yaitu dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Pembahasan

Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel opini audit memiliki nilai signifikansi sebesar $0,046 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_1 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H₁ diterima** yaitu opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Opini audit merupakan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor atas audit laporan keuangan. Opini menjelaskan mengenai pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang telah disajikan dalam laporan keuangan yang berdasar pada kriteria tertentu. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Apabila pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan (Muflihatin, 2016).

Teori keagenan ini menjelaskan hubungan agen dengan principal yang dimana pemerintah selaku agen hendak terus berupaya menerapkan pengelolaan keuangan dengan baik dan senantiasa memberikan pertanggungjawaban sehingga memperoleh opini audit yang baik. Opini audit pemerintah daerah yang semakin baik akan membuat masyarakat menjadi lebih percaya dengan pemerintah untuk mengelola keuangan pemerintah daerah yang dimana kinerja keuangan ini dapat diukur dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan jumlah transfer pusat maupun provinsi serta pinjaman yang dimiliki pemerintah. Melalui rasio kinerja keuangan tersebut dapat dinilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang telah dilakukan nampak bahwa opini audit dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit memiliki hubungan searah dengan kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budianto (2015) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Hasil yang sejalan juga diperoleh oleh Masdiantini (2016) yang menyatakan bahwa opini audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan Muflihatin (2016) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian Wijaya (2018) menunjukkan bahwa opini audit tidak

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel belanja modal memiliki nilai signifikansi sebesar $0,034 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_2 mempunyai kontribusi terhadap Y . Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_2 mempunyai hubungan yang searah dengan Y . Jadi dapat disimpulkan bahwa **H_2 diterima** yaitu belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Semakin besar persentase alokasi belanja modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif karena umumnya dalam penggunaan aset yang dihasilkan selalu bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum. Alokasi belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga jumlah alokasi belanja modal setiap tahunnya harus relatif besar. Semakin besar alokasi belanja modal, maka pelayanan pemerintah daerah kepada publik dapat dikatakan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara agen dan principal yang dimana pemerintah selaku agen dan masyarakat sebagai principal. Dalam kaitannya dengan belanja modal perlu adanya pelayanan yang diberikan kepada principal yakni masyarakat. Belanja modal yang besar dikatakan dapat menjamin pelayanan publik secara lebih baik, sehingga akan mengarah pada optimalnya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang telah dilakukan nampak bahwa belanja modal dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Kinerja keuangan dapat diukur dengan melihat pendapatan asli daerah yang dibagi dengan transfer pusat/provinsi dan pinjaman yang dimiliki pemerintah daerah. Kinerja keuangan ini juga tidak terlepas dari

belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah. Belanja modal yang tinggi tentu menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik karena tanpa ada pengelolaan yang baik maka tidak akan dapat melakukan belanja modal dalam jumlah yang banyak. Selain itu, belanja modal ini juga digunakan untuk kepentingan publik, sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andirfa (2018) yang menunjukkan bahwa apabila belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian serupa juga dihasilkan oleh Antari dan Sedana (2018) yang menunjukkan jika belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Yunita dan Rasmini (2020) juga turut menunjukkan jika belanja modal berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian oleh Pratiwi (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,026 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_3 mempunyai kontribusi terhadap Y . Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_3 mempunyai hubungan yang searah dengan Y . Jadi dapat disimpulkan bahwa **H_3 diterima** yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan

Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anggreni dan Artini, 2019). Semakin besar pendapatan asli daerah tentunya semakin baik pengelolaan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan semakin baik pula.

Hubungannya dengan teori keagenan yang dimana pemerintah sebagai agen tentunya harus dapat mengelola potensi-potensi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan keuangan yang baik dan akhirnya akan menciptakan kinerja keuangan yang memadai bagi pemerintah daerah dan dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai principal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggreni dan Artini (2019) menunjukkan jika PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung. Hasil penelitian serupa juga diperoleh Pratiwi (2018) yang menunjukkan jika terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Suseno (2018) juga menunjukkan jika pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum memiliki nilai signifikansi sebesar $0,036 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_4 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_4 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima yaitu dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Semakin banyak dana yang diberikan oleh pusat ke daerah tentunya daerah akan semakin banyak memiliki dana, sehingga dapat menjalankan program-program yang efektif. Hal ini tentunya dapat berdampak pada kinerja keuangan karena dengan semakin banyaknya dana tentu akan lebih mudah dalam pengelolaan dan pembangunan secara merata.

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen dengan principal. Sektor pemerintah mempunyai kewajiban sebagai agen untuk mempertanggungjawabkan keseluruhan aktivitas kepada principal yang tentunya memiliki hak dalam meminta pertanggungjawaban kepada agen.

Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang telah dilakukan nampak bahwa dana alokasi umum dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintahan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan transfer pusat/provinsi dan jumlah pinjaman yang dimiliki pemerintah daerah. Kaitannya dengan dana alokasi umum bahwa dengan semakin tinggi DAU yang diperoleh pemerintah daerah maka semakin tinggi pula dana yang digunakan menjalankan program kerja sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah karena lebih banyak dana yang dapat dialokasikan untuk program tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sherly (2018) menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian serupa juga dilakukan oleh Putra (2015) menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah. Penelitian oleh Azizah (2019) juga menunjukkan jika Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Gracenov (2016) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel dana alokasi khusus memiliki nilai signifikansi sebesar $0,018 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_5 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_5 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H_5 diterima** yaitu dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Kemudian, Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

Teori keagenan mengkaji mengenai hubungan antara agen dengan principal. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban sebagai agen untuk mempertanggungjawabkan keseluruhan aktivitas kepada masyarakat sebagai principal yang tentunya memiliki hak dalam meminta pertanggungjawaban kepada agen. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah berupa penyajian laporan yang kemudian digunakan oleh masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan termasuk mengelola keuangan. Salah satu bentuk dana yang hendak dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah adalah dana alokasi khusus yang diperuntukkan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai

dengan prioritas nasional. Pemerintah daerah tentunya harus dapat mengalokasikan dana tersebut untuk menunjang keuangan daerah dan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang telah dilakukan nampak bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dana alokasi khusus memiliki hubungan searah dengan kinerja keuangan yang berarti bahwa semakin tinggi dana alokasi khusus maka kinerja keuangan akan semakin baik pula. Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan transfer pusat/provinsi dan jumlah pinjaman yang dimiliki pemerintah daerah. Kaitannya dengan dana alokasi khusus bahwa dengan semakin tinggi DAK yang diperoleh pemerintah daerah maka semakin tinggi pula dana yang digunakan menjalankan program kerja sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah karena lebih banyak dana yang dapat dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azizah (2019) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian serupa juga dilakukan oleh Gracenov (2016) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Putra (2015) juga menunjukkan bahwa variabel dana alokasi khusus berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah. Penelitian oleh Sherly (2018) juga turut menunjukkan bahwa variabel dana alokasi khusus berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat ditarik simpulan, yaitu: (1) opini audit (X_1) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah, (2) belanja modal (X_2) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah, (3) pendapatan asli daerah (X_3) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah, (4) dana alokasi umum (X_4) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah, dan (5) dana alokasi khusus (X_5) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Saran

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi diharapkan tetap memperhatikan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah karena akan berdampak pada opini audit yang dimana hal ini akan mempengaruhi kinerja keuangan. Pemerintah diharapkan dapat melakukan belanja modal dengan menggunakan skala prioritas sehingga tujuan organisasi dapat tercapai melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik. Pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan PAD dengan melakukan pemantauan yang memadai pada potensi-potensi pendapatan daerah dan melakukan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan baik.

Selain itu, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara efektif dan efisien, sehingga program-program utamanya untuk kesejahteraan rakyat dapat berjalan secara baik. Pengalokasian dana alokasi umum dan alokasi khusus juga hendak dilakukan dengan skala prioritas sehingga akan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dan mempertimbangkan variabel lain yang belum diuji dalam penelitian ini yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan, seperti kompetensi SDM, moralitas, transparansi dan lain sebagainya.

DAFTAR RUJUKAN

- Andirfa, M., H. Basri, dan M.S.A.Majid. 2018. "Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Aceh". *Jurnal Magister Akuntansi* ISSN 2302-0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pp. 30- 38.
- Anggreni, N. K. A dan L.G. Sri Artini. 2019. "Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 8, No. 3, 2019: 1315 - 1345 ISSN: 2302-8912.
- Azizah, Nabila. 2019. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2016*. Skripsi. Universitas Gunadarma.
- Budianto, W. 2015. *Pengaruh Opini, Temuan Audit dan Gender Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008-2010*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Gracenov, G. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten Se-jawa Tengah*. Disertasi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Horota, P. 2017. "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura". *Jurnal Keuda* Vol. 2 No. 1.
- Kusuma, P.M. 2017. "Pengaruh Opini Audit dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia". *Equity* Vol. 20, No. 1 Universitas Sebelas Maret.

Masdiantini, P. R. 2016. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan, dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 14, Hal 1150-1182.

Muflihatin, A. 2016. *Pengaruh Opini Audit, Fungsi Pengawasan DPRD, dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pratiwi, Tri Yuni. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Putra, Zainal. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. Tesis. Universitas Syiah Kuala.

Suseno, Ajeng Agysta. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016)*. Skripsi. Universitas Pasundan.

Tahir, Irmayunita. 2018. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Muslim Indonesia.